

# Separatisme, Kedaulatan dan Keamanan Negara

Indonesia sudah berusia 73 tahun. Tapi ada sisi muris yang masih mewarnai perjalanan Indonesia, yaitu masih adanya gerakan separatisme. Fakta tersebut bisa terbuktikan dari pernyataan dari Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengaku bertanggungjawab atas peristiwa penyerangan dan pembunuhan satu anggota TNI dan karyawan PT Istaka Karya. Motif penyerangan karena menganggap pembangunan di Papua sebagai penjajahan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah pada TNI-Polri dan pemerintah Indonesia.

## Lawan KKB atau Sepatisme

Gerakan separatisme yang mendapat tempat untuk berkembang di Indonesia. Sebab hal itu bisa mengancam kedaulatan dan kesatuan negara. Selama ini, kalau kita analisis bersama negara kita Indonesia masih bersikap ramah terhadap separatisme dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Padahal, separatisme di Papua, sebenarnya, bukan semangat yang baru diteriakkan kemarin. Diaku atau tidak, masih ada semangat memisahkan diri dalam KKB yang dulunya disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pemerintah dan penegak hukum pemerintah sudah saatnya tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme. Fakta tersebut, bisa kita artikan bahwa saat ini kita sudah berhadapan dengan kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak.

Keberadaan separatisme harus dilawan demi menegakkan wibawa negara. Apalagi, kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu membunuh secara brutal sejumlah pekerja PT Istaka Karya, di Nduga. Sekitar 40 anggota kelompok Egianus

juga menyerang pos pengamanan TNI di Distrik Mbuu, Nduga, Senin (3/12). Seorang anggota TNI, Seran Handoko, gugur dalam peristiwa itu. Seorang tentara lain terluka tembak, (harian Kompas, 3/12)

Melihat peristiwa yang ada di Nduga dan apa pun alasannya, pembunuhan terhadap pekerja proyek dan penyerangan terhadap pos TNI jelas sudah dapat dikategorikan sebagai penyerangan berskala besar. Jadi, terlepas dari KKB atau separatisme, tragedi Nduga harus dasud tuntas. Merujuk dari konteks itulah, saatnya kita mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI dan Kapri untuk mengesjar dan menangkap seluruh pelaku tindakan badak tersebut. Karena bagaimanapun, kalau kita perhatikan semen sesama skala dan intensitas penyerangan itu, sudah sepatutnya militer bersama kepolisian harus membatu mengesjar kelompok separatist di Papua tersebut.

Namun, sisi lain, kita juga perlu bijak dengan sikap yang telah diambil pemerintah selama ini, yang jauh memilih jalan hati-hati. Sebab, kita harus bisa memahami bahwa ada sensitivitas tertentu dalam penanganan insiden Nduga. Selama ini, pemerintah memang dinilai mengambil sikap berhati-hati dalam menangani berbagai kasus di Papua. Hal itu terutama karena pelaku penembakan di Papua kerap menggunakan isu hak asasi manusia (HAM) untuk menghindar dari jeratan hukum.

## Solusi bagi separatisme

Selaku penulis, besar harapan terhadap pemerintah dan penegak hukum yang ada tidak ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI.



Oleh  
Ani Sh Rahayu

Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak. Melihat kondisi yang memang demikian militer yang harus menangani masalah ini. Apalagi proses diplomasi sudah sulit dilakukan. Lebih jelasnya, berikut ini beberapa langkah

yang bisa diambil langkah alternative untuk melawan separatisme.

**Pertama**, mengesjar separatisme itu adalah bagian dari terorisme. Jadi, menanggulangi gerakan semacam itu, yang ingin memisahkan diri dari negara yang berdaulat, jelas-jelas memerlukan tentara. Jadi memang harus gerakan tentara yang menangani persoalan seperti itu.

**Kedua**, ada baiknya Komnas HAM untuk turut membantu polisi dan TNI. Misalnya melakukan pendekatan diplomatis. Komnas HAM bisa membantu TNI Polri untuk melakukan diplomasi kepada mereka. Kalau jelas-jelas mereka itu separatisme karena ingin memisahkan diri dari NKRI maka pemerintah harus bersikap untuk menghindari adanya korban-korban berikutnya.

**Ketiga**, menurut saya sebagai penulis pada dasarnya manusia diciptakan dengan akal sehat, kehendak, perasaan, dan hati nurani. Karena itu, siapa pun pasti memiliki kemampuan berkomunikasi dan berdialog dengan orang lain, termasuk pemerintah dan masyarakat Papua. Secara umum, kondisi di Papua saat ini, orang tidak merasa nyaman dan aman. Ketidaknyamanan dan ketidakamanan ini tidak hanya dirasakan masyarakat asli Papua, tetapi juga siapa pun yang kini tinggal di Papua. Kekerasan muncul bagaimana asap. Dis bukan masalah, melainkan akibat. Asap pasti muncul karena ada api. Selama faktor penyebabnya

belum ditemukan, selama itu pula kekerasan-kekerasan akan terus terjadi dan mengganggu pembangunan.

**Keempat**, menurut saya, penyebab utama kekerasan di Papua adalah munculnya dua paradigma yang berbeda dan bertentangan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Di satu pihak pemerintah mempunyai paradigma separatisme. Mereka melihat dan mencurigai masyarakat Papua sebagai menyiapkan gerakan separatist. Setiap kegitan budaya di Papua dicap separatist, setiap suara yang memperjuangkan hukum dan perdamaian juga dicap separatist. Seperti halnya orang memakai kacamata hitam, segala hal yang dilihat adalah separatisme. Di sisi lain, masyarakat Papua juga punya paradigma sendiri, yaitu kolonialisme. Pemerintah dianggap sebagai penjajah. Karena dianggap penjajah, menurut mereka tidak mungkin pemerintah membangun Papua. Sekarang persoalan ini bisa dikembalikan ke dua paradigma ini bisa dikembalikan. Kedua belah pihak harus keluar dari paradigma masing-masing dan mencari titik temu untuk mengambil paradigma baru. Inilah yang perlu dicari dalam dialog.

**Kelima**, penanganan masalah tragedi di Papua, terutama terhadap separatisme tidak cukup diserahkan kepada pemerintah. Sekiranya, harus ada gerakan serentak yang merupakan gabungan dari beberapa faktor. Pendekatan keamanan saja tidak cukup jika tidak ada pendekatan kesejahteraan. Apalagi, masalah kesejahteraan inilah yang menjadi salah satu penyebab gejala di Papua. Dalam perspektif itulah, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah saat ini patut didukung sepenuhnya. Pembangunan yang gencar dilakukan di Papua bertujuan memakmurkan rakyat setempat. Manajemen pembangunan di Papua sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran.

Trainer P2KK dan Pengajar  
PPKn Univ. Muhammadiyah  
Malang